

KEWENANGAN PEMERINTAHAN KAMPUNG WAROI TERHADAP KINERJA APARATUR DI KAMPUNG DISTRIK YENDIDORI KABUPATEN BIAK NUMFOR

THE AUTHORITY OF THE GOVERNMENT OF KAMPUNG WAROI ON THE PERFORMANCE OF APPARATUS IN KAMPUNG, YENDIDORI DISTRICT, BIAK NUMFOR REGENCY

Mateus Sukan¹ dan Sutrimono²

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik IISIP Yapis Biak
Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi IISIP Yapis Biak

ABSTRAK

Kewenangan pemerintah kampung adalah bagian yang sangat penting artinya bagi kelangsungan pelayanan dalam pembangunan Pemerintah tingkat Kampung khususnya Pemerintah Kampung Waroi kedepan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan yang diberikan Pemerintah tingkat, atau harus berhati-hati dan teliti supaya ada tujuan Pelayanan baik, mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan sehingga kewenangan yang dimiliki Kepala Kampung, dan menjalankan upaya-upaya dalam Kewenangan Pemerintah Kampung Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan asosiatif kausal, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Kewenangan Kinerja Aparatur terhadap Pemerintahan, khususnya pemerintah di Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor, bagi peneliti adalah sangat penting, karena ada hubungannya dengan tugas pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga harus selaku diperbaharui dan dibeahi terus kedepan, agar mampu dalam berkontribusi memberikan sumbangan pikiran yang baik kedepan pada dewasa ini, pada perkembangan era globalisasi zaman yang berkembang.

Kata Kunci: Peran Kepala Kampung, Peningkatan Partisipasi, Berpolitik.

ABSTRACT

The authority of the village government is a very important part for the continuity of services in the development of the village level government, especially the waroi village government in the future. The purpose of this study is to determine the authority given by the government at the level, or to be careful and thorough so that there is a good service goal, to find out what factors cause the authority of the Village Head, and to carry out efforts within the Government Authority of Waroi Village District, Yendidori, Biak Numfor Regency. The research method used is a qualitative research method with a causal associative approach, data collection techniques used are observation, interviews, documentation and literature study. While the data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The authority of the performance of the apparatus to the government, especially the government in Waroi, Yendidori District, Biak Numfor Regency, for researchers is very important, because it has to do with the task of good service to the community, so it must be updated and improved continuously in the future, so that they are able to contribute to contributing ideas that are good for the community. well in the future today, in the development of the era of globalization that is developing.

Keywords: *The Role of the Village Head, Increased Participation, Politics.*

PENDAHULUAN

Kewenangan Pemerintah Kampung adalah bagian yang sangat penting artinya bagi kelangsungan pelayanan dalam pembangunan Pemerintah tingkat Kampung khususnya Pemerintah Kampung Waroi kedepan. Dimana kewenangan Pemerintahan pada tingkat kampung adalah jabatan politik, maksudnya bagi penulis adalah merupakan jabatan (netral) dan bukan jabatan karir, maka atas kewenangan Pemerintah Kampung Waroi di atur dalam sistem roda Pemerintahan yang sedang berputar dipimpin oleh Kepala Kampung sebagai ujung tombak pemerintah yang sedang berputar dipimpin oleh Kepala Kampung sebagai ujung tombak Pemerintahan; baca jabatan Politik bagian ini berdasarkan “undang-undang Pemerintahan Desa Nomor : 06 Tahun 2014. Dimana Bab I, Ketentuan umum,” Pasal 1 ayat 11 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan Namaha itu, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum kewenangannya untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintah.

Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh sebab itu bila di kaji kedepan, Pemerintah Kampung Waroi, Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan dapat mengurus Rumah Tangganya sendiri. Karena itu Pemerintah Tingkat Kampung Waroi diatur oleh seorang Kepala Kampung, kewenangan dan sistem mengenai kinerja Pemerintahannya diatur berdasarkan kepada jabatannya (baca; politik) dengan demikian Kepala Kampung Waroi sekali lagi disebut “ujung tombak Pemerintahan-Pemerintahan, kewenangannya adalah mengatur kinerja Aparaturnya, dalam sistem yang baik, supaya tidak ada permasalahan (Administrasi Tumpang Tindih). Sehingga kewenangan, sistem, kinerja Aparatur Kampung Waroi, Distrik Yendidori dapat memberikan pelayanan yang baik, dan tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi).

Sehingga penulis sangat peduli dan mengangkat judul ini sebagai bagian yang perlu ditindaklanjuti dengan teliti, karena jika kewenangan Pemerintahan Kampung Waroi terhadap kinerja Aparaturnya, tidak sinkronisasi dan atau tidak menyambung baik kedepan sebagaimana yang diharapkan maka Program rencana Pembangunan pada Pemerintahan Kampung Waroi tidak berjalan dengan baik sesuai yang sedang diharapkan.

Hal ini berarti ada masalah pada Pemerintahan Kampung. Khususnya Pemerintahan Kampung Waroi Distrik Yendiodri, dimana Pemerintah Kampung adalah jabatan politik bukan karier.

Untuk maksud tersebut sebagai Kepala Kampung atau Kepala Pemerintahan di tingkat memiliki kewenangan multak dan bertindak sebagai peneendali perencana program pembangunan di tingkat Kampung.

Oleh sebab itu, menurut Profesor Fukuyama dalam bukunya. "Building Governance And Word In the 21 St Century (Bahwa negara baca: Pemerintahan yang gagal adalah sumber dari banyaknya permasalahan berat dunia "dimana dapat menyimpulkan bahwa : "kegagalan mengurus Pemerintahan adalah karena adanya sautu masalahh-masalah. Ini berarti masih ada sesuatu yang kurang dan terus di benahi kembali, maksud adalah bahwa "kewenangan Pemerintah tingkat Kampung Waroi pada khususnya kepada "kewenangan kinerja terhadap Aparaturnya." Agar mempunyai kemampuan, keterampilan dan sikap yang dimiliki Aparatur atas kinerjanya. Tidak boleh lagi bergantung kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten Distrik tetapi mampu dan dapat melepaskan ketergantungannya dalam kemandirian menuju Pemerintah Kampung

yang sejahtera. Berangkat dari maksud tersebut, berdasarkan undang-undang otonomi khusus Papua dan Papua Barat (Otsus), No: 21 Tahun 2001 "tentang otonomi khusus bagi Papua dan Papua Barat, dan sesungguhnya undang-undang no: 21 Tahun 2001 memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat. Yang diakui didalam sistem Pemerintahan Nasional (yang berada di daerah Kabupaten/Kota, (Self Governing Com Munity) dasar refrensi membangkitkan kekuatan dashyat Rakyat Papua, pembangunan kampung. Oleh DR. Barnabas Suebu, SH, hal 51 Thn 2010).

Adapun kewenangan pemerintah kampung dimaksud dalam tugas pelayanan adalah sebagai berikut, dimana kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggara pemerintah desa (pasal 19 UU desa no: 6 tahun 2014 Bab IV). Bab IV menjelaskan bahwa "kewenangan yang tugaskan oleh pemerintah, daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".

Sebagaimana diketahui bahwa yang disebut sebagai perencana adalah kepala kampung, sekretaris kampung, kepala-kepala urusan mempunyai kewenangan untuk

merencanakan program pembangunan dan menyusun perencanaan serta penjabaran “Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah sebagai dasar, agar memahami jelas kinerja dalam pelayan, jika tidak maka kekeliruan tidak ada acuan dasar yang menjadi pedoman.

Brangkat dari maksud tersebut, maka perlu perencanaan matang ada Rerstra (Rencana Strategi), sebagai indikator keberhasilan kinerja pelayanan, seiring dan sejalannya tuntutan pemerintahan agar pemerintah tingkat kampung mandiri, mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri dengan menggali segala potensi yang dimilikinya artinya bahwa potensi yang di desa baik fisik maupun non fisik yang mampu memberikan kontribusi (dalam kehidupan perkembangan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat desa) dengan demikian kewenangan dan kinerja sukses dalam pelayanannya kepada masyarakat dan sebagai barometernya bagi kepala kampung yang mampu menterjemahkan segala kepentingan aspirasi masyarakatnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi pelaksanaan penelitian adalah Kampung Warai Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif menggunakan pendekatan asosiatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif dengan model interaktif menurut Miles dan Haberman (1992:16) yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Pemerintahan Kampung

Kewenangan Pemerintahan Kampung terhadap kinerja Aparatur Kampung Warai, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor dapat berjalan dengan baik dan ada peningkatan kinerjanya. Kata kuncinya adalah “Kinerja Aparatur seharusnya dapat ditinjau lebih lanjut supaya tidak terjadi persoalan tumpang tindih manajemennya, tetapi sesungguhnya, lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahannya sesuai rencananya, dan mencapai tujuan yang diharapkannya.

Pada dewasa ini, pemerintah telah berupaya dengan sungguh - sungguh memberikan kewenangan yang luas bagi, pemerintah kampung untuk bertindak dan lebih leluasa mengatur dan memimpin, dimana dasar Hukumnya UU desa No: 06

tahun 2014. Jika kesempatan ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan berakibat buruk terhadap kinerjanya, dalam hal ini pemerintah di tingkat kampung, ini berarti masyarakat yang dirugikan, berangkat dari maksud tersebut Kepala Kampung dan staf aparatur berhati-hati dalam melaksanakan kepercayaan yang diberikan masyarakatnya, dimana fokusnya pada Kampung Waroi, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, yang adalah sasaran yang perlu untuk dapat dilayani dengan serius dan sungguh - sungguh dapat diperhatikan kedepan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu Kepala Kampung menyusun suatu strategi kepemimpinan yang baik, untuk menjadi dasar yang kuat, agar menjadi acuan dalam mempelajari kondisi ril (nyata) yang dihadapinya, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjalankan sistem pemerintahan yang dipimpinnya, jika rencana yang baik, maka tujuan yang diharapkan tidak menjadi jelas dan kinerja aparatur dan masyarakatnya melemparkan kuncinya belum mampu dalam melaksanakan tugasnya, oleh sebab itu berhati-hati supaya tidak terjadi persoalan tumpang tindih manajemennya karena pelayanan harusnya manajemen pelayanannya, harusnya mengutamakan pelayanan yang baik, transparansi

(keterbukaan), agar tidak terjadi persoalan dan atau tidak terjadi tumpang tindih pelayanan dimana ujungnya merugikan masyarakat, karena fokus utama kinerja aparatur pemerintahan adalah memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang adalah tujuan utama dan sasaran utama yang perlu dilayani. Oleh sebab itu sebaiknya tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), harus jelas.

Berangkat dari maksud dan tujuannya maka solusinya adalah kewenangan kinerja aparatur kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung seharusnya bekerja sama dengan tim tiga tungku (pemerintah, tokoh adat dan tokoh agama) rangkul mereka supaya ada hubungan timbal balik yaitu pengawasan kedalam lingkungan pemerintahan, karena pengawasan adalah merupakan pendekatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam rangka memastikan kerja sama suatu roda pemerintahan yang baik dan direncana.

Untuk dibagian ini perlu dilaksanakan dan tidak terlepas dari kinerja aparatur kampung (tokoh adat, agama dan pemerintah) dimana khususnya Pemerintah Kampung Waroi Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, agar memahami betul kinerja aparaturnya, mampu dan bertindak sesuai fungsi pelayanannya kepada masyarakatnya,

karena dipundaknya melekat "rasa kepedulian terhadap masyarakat". Itulah sebabnya berkaitan dengan judul yang di angkat sebagai acuan dasar dan kajian penelitian ini, dimana "Kewenangan" adalah kesempatan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan atas dasar hukum, sehingga pemerintah yang di pimpin dapat di koordinasikan dengan baik dan berkekelanjutan kedepan."

Pemerintah kampung di defenisikan menurut UU No: 21 tahun 2001 tentang "otonomi kusus bagi propinsi papua, yaitu : kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten /Kota".

Kampung dalam kepentingannya adalah suatu "*Self Goferning Communtty*" yang sesungguhnya memiliki cita - cita yang luhur dan besar. Beberapa bagian penting diantaranya adalah; Masyarakat di kampung mampu mengatur dan mengurus kepentingan mereka sendiri demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Selanjutnya pengaturan dan pengurusan kepentingan bersama itu dapat di lakukan

sesuai adat - istiadat setempat. Pengaturan dan pengurusan kepentingan bersama itu dilakukan tidak terlepas dari kepentingan nasional. Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Kota harus memberikan fasilitasi hal-hal pada roda angka (1), (2), (3), diatas ini dapat dilakukan degan benar sesuai degan harapan.

Sehubungan degan kewenangan dimaksud adalah penting dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kinerja aparatur pemerintah tingkat kampung berpeluang dalam mengawal aspirasi dari kehendak masyarkatnya, serta memberikan motivasi/dorongan balik untuk dapat mengatur sistem kerja dalam pelayanan agar tercapai sasaran pelayanan yang lebih baik kepada masyarakatpada umumnya pada khususnya" di Pemerintah Kampung Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor yang masih belajar dari kekurangannya yang dihadapi untuk selanjutnya kedepan akan dibenahi dan diperbaiki agar kinerja aparaturnya dapat berjalan degan baik kedepan, karena bila dikaji dan di lihat pada dua bagian peting yang perlu di catat sebagian pedoman dalam menjalankan kewenangan roda pemerintahan di tingkat kampung yaitu: (1) ketersediaan Instrumen Fisikal " (2) Adanya kepentingan kampung yang memiliki

kapabilitas manajemen yang memadai. Itulah sebabnya, adalah sangat penting untuk dikaji bahwa "kewenangan dari Aparatur kampung terhadap kinerja pemerintahan, haruslah di bekali dan bina, di latih dengan baik agar dapat memiliki kapasitas kepemimpinan yang sangat memadai, yang di tunjukkan dengan Integritas diri yang tinggi dan kemampuan untuk mampu dalam memimpin serta menyelenggarakan asal-asalan saja, tetapi benar-benar mampu jawab.

Terkait dengan hal tersebut pemerintahan kampung adalah "suatu organisasi yang terus bertumbuh menjadi birokrasi modern, sejalan dengan terus berubahnya perkembangan dan pertumbuhan di dalam skala yang jauh lebih kecil di bandingkan pemerintahan yang di atasnya; dengan demikian bagi peneliti fokus utamanya adalah pemerintah Kampung Waroi, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor, kinerjanya harus benar-benar menuntut untuk lebih memiliki kemampuan (kapabilitas manajemen yang harus memadai), disinilah pentingnya pemerintahan propinsi, kabupaten, Distrik untuk dapat memberikan perhatian yang serius terhadap kapasitas kepemimpinan dan kapabilitas manajemen pemerintahan kampung, mulai dari kepala kampung, sekretaris kampung dan Badan Musyawarah Kampung. Tanpa kapasitas dan

kapabilitas seperti kinerja Aparatur Pemerintah Kampung tidak akan berhasil dengan baik.

Faktor - Faktor Yang Menjadi Hambatan Dalam Pemerintahan Kampung Waroi, Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.

Adapun didalam menjalankan kinerja aparatur dikampung waroi, distrik yendidori, kabupaten biak numfor, ada faktor - faktor yang menghambat jalannya roda pemerintahan, terkait dengan berbagai kendala yang dihadapi didalam menyelenggarakan pemerintahannya. Kendala - kendala sebagai faktor penghambat adalah; Aparatur punya pendidikan yang rendah tingkat lulusan terbatas SD, SMP, dan paket C sederajat SMA, ini berarti bukan semuanya tapi yang nyata ditemui di lapangan terdapat aparaturnya yang diangkat untuk menduduki jabatan kepemimpinan dalam staf kepala - kepala urusan pemerintah kampung ini, (Bukan di intervensi tetapi adalah suatu fakta). Aparatur (kepala -kepala urusan pada bidang tugas pelayanan masing -masing kurang memahami fungsi tugasnya (TUPOKSI), sehingga segala pekerjaannya terkait kinerjanya (faktor pendidikan), dan kewenangan pada bidang dan tugas selalu dilaksanakan oleh sekretaris kampung dan kepala kampungnya, bagian dari tugas

aparatur yang bekerja sebagai staf selalu mengharapkan administrasi (manajemen) yang dilaksanakan oleh sekretaris kampung dan kepala kampungnya. Tidak berdisiplin dalam melaksanakan tugas utamanya menyebabkan terjadi tumpang tindih tugas administrasi (kaitannya dengan surat menyurat dan kearsipan).

Adapun badan musyawarah kampung selalu bertolak belakang kepada aparatur (kepala urusan), sehingga menimbulkan suatu masalah dalam manajemen dari kinerja pemerintah kampung (minimnya rasa saling percaya, perbedaan kepentingan, persepsi, dan lamanya pengorganisasian partisipasi (ikut serta)". Komponen masyarakat bersama tim tiga tumpu (adat, agama, pemerintah), tidak mau mendukung kinerja pemerintahan, karena ada alasannya, yaitu diperintahan kampung menuntut haknya, terkait dengan financial (insentif, honor), walaupun diberikan.

Selain itu, konsep wawasan masyarakat sangat berbeda pendapat, sehingga sulit diatur, hal ini masih menjadi problem (masalah) terus menerus, sehingga kedepan harus diberi pembekalan agar pemahaman ini, dirubah agar ada kesabaran dan ada kesetiaan untuk melaksanakan tujuannya, sebelum menuntut haknya. (bagianini akan dipilah

dibahas, agar kedepan diperhatikan), supaya tidak terjadi hambatan kepada pelayanan, khususnya kepada masyarakat.

Upaya Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kampung.

Upaya agar supaya tidak terjadi manajemen yang tidak tumpang tindih dalam pelayanan kepada masyarakat yang dipimpin. Ada cara yang ditempuh untuk mengamankan dan mengantisipasi kinerja melalui kewenangan yang dimiliki ditingkat pemerintah kampung pada umumnya, dan pada khususnya "pemerintah kampung Waroi, Distrik Yendidori, Kabupaten Biak Numfor adalah menggunakan metode sederhana (praktis) rumah, bagi peneliti disini yaitu; menilai apakah sistem pemerintah (birokrasi) benar dan sudah melayani kebutuhan masyarakatnya, pada dasarnya ada solusinya, adakan pendekatan-pendekatan supaya masyarakat bisa memahami dan memberikan dukungan, artinya bahwa masyarakat kecil yang bermungkin di kampung Waroi, lebih setuju program yang direncanakan harus disepakati benar dan jangan diatur sepihak saja oleh pemerintah kampung atas dasar petunjuk dari atas ke bawah, alasannya bahwa sudah diberikan kewenangan dari pemerintah atas untuk menjadi dasar dalam mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, sehingga ketika ada pertemuan masyarakat

tidak hadir untuk mengikuti rapat yang dipimpin oleh kepala kampung dan staf aparaturnya. Oleh sebab itu adalah suatufakta dilapangan, dengan demikian solusinya sekali lagi harus ada "pendekatan baik" kepada komponen masyarakat yang dipimpinnya.

Pendekatan inilah yang harus dilaksanakan terus-menerus agar masyarakat memahaminya, karena bila dilihat masyarakat sebagian adalah propesi sebagai pegawai (PNS) dan pengenggur berlatar belakang disiplin ilmu yang ditugaskan dikampung, yang mempunyai idea atau gagasan berpengaruh kuat kepada masyarakat, sebenarnya mereka tidak intervensi tetapi selalu mengamati ril masyarakat.

Terkait dengan upaya yang dilakukan maka adalah hal yang mendukung yang sudah dibahas, perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Memperkuat tata pemerintahan pada tingkat kampung, khususnya padakampung waroi, distrik yendidori agar mampu membaca kondisi rill (nyata) pada lingkungan perintahan yang di pimpinnya.
2. Kepada kampung adalah pengendali yang disebut ujung tombak pelayanan dari masyarakat yang berkepentingan dalam memberikan kontribusi pikiran dalam soal pelayanan yang baik.

3. Kepala kampung harus merangkul komponen masyarakat dalam sistem barisan pelayanan mau terbuka, setia jujur dalam melaksanakan kinerjanya agar masyarakatnya peduli terhadap kepemimpinannya.
4. Bagian berikut jangan memberikan janji kepada masyarakat, sebab ada banyak kekurangan yang dihadapi selaku manusia, berakibat pula kepada kinerja.

Dengan demikian upaya untuk supaya menjawab pelayanan yang baik kepada masyarakat haruslah "berdasarkan kepada suara hati rakyat melalui pendekatan - pendekatan" balik sehingga implementasi ataupun pelaksanaan penyelenggaraan kinerja dari pemerintahan kampung terwujud dan tujuan pelayanan dapat tercapai dengan baik, dan benar sesuai fungsi tupoksinya. Dan persoalan - persoalan terkait kewenangan lewat sistem dan kinerja aparatur kampung berjalan baik dan menjawab kebutuhan masyarakatnya, khusus kampung waroi, distrik yendidori kedepan, akan menjadi lebih baik lagi. Sehingga masyarakat punya harapan, karena masyarakat adalah sasaran yang perlu dilayani.

Hal tersebut bertolak dari masalah yang diangkat dalam latar belakang yang hendak dikaji dan dibatasi, terkait dengan Judul yang

diteliti tentang "Kewenangan pemerintahan kampung terhadap kinerja aparatur kampung Waroi ", Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor.

Adapun solusi sebagai jawaban balik untuk memperbaiki dan membenahi kekurangan yang dihadapi pada pemerintahan kampung pada umumnya, lebih khusus dikampung Waroi kedepan adalah hendaknya diterapkannya nilai dasar (prinsip) dalam sistem program pembangunan kampung supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam manajemen dan kepemimpinan seorang kepala kampung dan staf aparaturnya.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Kewenangan Kinerja Aparatur terhadap Pemerintahan, khususnya pemerintah di Waroi Distrik Yendidori Kabupaten Biak Numfor, bagi peneliti adalah sangat penting, karena ada hubungannya dengan tugas pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga harus selaku diperbaharui dan dibenahi terus kedepan, agar mampu dalam berkontribusi memberikan sumbangan pikiran yang baik kedepan pada dewasa ini, pada perkembangan era globalisasi zaman yang berkembang

Supaya kedepan tidak terjadi tumpang tindih dalam sistem pelayanan yang baik keterbukaan (transportasi) pemerintah kampung dalam hal ini di pimpin oleh kepala kampung, sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fukuyama, Prof. 2004. *State Building; Governance and World Other in yhe 21 st Century*.
- Kartono Djatmika. 2002. *Pedoman Pengumpulan dan Analisis Data Terenca*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pres.
- Mas'oeed & MacAndrews.2003. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Surahman 1983. *Langkah-langkah pengamatan sederhana*, Surabaya: Erlangga Press
- Nazsir. Nasrullah dan Amril Ghaffar Sunny. 2004. *Partai Politik, Partisipasi Politik dan Pendidikan Politik*. Bandung: PPS FISIP UNPAD Press.
- Rahman.H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rajagrafindo olisin, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: UNY
- Sebu, Barnabas. 2010. *Pembangunan Kampung*, Hal 51
- Sumbu, Sell dan dkk. 2010. *Kamus Umum Politik dan Hukum*. Jakarta; Jala Permata Aksara.
- Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Otsus Papua No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
- Wamafma, Tahun 2006 " Statistik dan Teknik Tabulasi Kantaprawira, R. 2004.Sistem

Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar.
Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Yani, Ahmad. 2001. Surat Kinerja Legislatif,
Jakarta: Rajawali Press